

The State of the Acehese Economy During the Japanese Occupation, 1942-1945

Mawardi¹; Muhammad Adika Nugraha²; Muhammad Haikal³; T. Bahagia Kesuma⁴

^{1,2,3,4}Universitas Syiah Kuala

✉mawardiumar@usk.ac.id

Abstract

This study examines the economy of Aceh during the Japanese occupation (1942–1945), a critical period in Indonesian history. The Japanese colonial government's centralized and tightly controlled policies had a significant impact on Aceh's economic structure, which had previously relied on agriculture, trade, and plantations. The Japanese implemented exploitative economic policies, including the control of natural resources and the seizure of agricultural land, to support the war effort. The consequences included a decline in food production, shortages of basic commodities, and a widespread economic crisis among the population, resulting in a deterioration of the people's welfare. This study employs a qualitative approach and critical historical research, analyzing primary and secondary sources as well as literature reviews to reconstruct Aceh's economy under Japanese colonial rule. The findings reveal that the Japanese colonial government dismantled the traditional economic order to support the Greater East Asia Co-Prosperty Sphere's war machine. The policies of mandatory rice surrender and jatropha cultivation forced the Acehese people to abandon their traditional subsistence farming practices, leading to mass starvation and chronic food shortages. The circulation of large quantities of Japanese invasion currency triggered hyperinflation that destroyed the people's purchasing power. The traditional plantation sector also suffered total collapse due to forced land conversion, which severed the export trade chain that had previously been a mainstay of the economy. This Japanese policy has left an economic legacy that has shaped Aceh's development since independence.

Keywords: *Economy, Japanese Occupation, War Economy.*

Keadaan Perekonomian Aceh Masa Penjajahan Jepang, 1942-1945

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perekonomian Aceh masa penjajahan Jepang (1942–1945), yang menjadi periode kritis dalam sejarah Indonesia. Kebijakan pemerintah penjajahan Jepang yang sentralistik dan terkontrol ketat membawa dampak signifikan terhadap struktur ekonomi Aceh, yang sebelumnya bergantung pada pertanian, perdagangan, dan perkebunan. Penerapan kebijakan ekonomi eksploitatif dengan pengendalian sumber daya alam dan pengambilalihan lahan pertanian dilakukan Jepang untuk mendukung perang. Implikasinya adalah terjadi penurunan produksi pangan, kelangkaan bahan pokok, krisis ekonomi yang meluas di masyarakat, yang berakibat terjadinya kemerosotan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian Sejarah kritis, dengan menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder, serta studi literatur untuk merekonstruksi perekonomian Aceh pada masa penjajahan Jepang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah penjajahan Jepang telah membongkar tatanan ekonomi lama untuk mendukung mesin perang Asia Timur Raya. Kebijakan wajib serah padi dan tanam jarak memaksa masyarakat Aceh meninggalkan pola pertanian subsisten tradisional yang menyebabkan kelaparan massal dan defisiensi pangan kronis. Beredarnya mata uang invasi Jepang dalam jumlah banyak memicu hiperinflasi yang menghancurkan daya beli masyarakat. Sektor perkebunan tradisional juga mengalami kehancuran total akibat konversi lahan secara paksa telah memutus mata rantai perdagangan ekspor yang

sebelumnya menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Kebijakan Jepang ini telah meninggalkan warisan ekonomi yang berdampak pada perkembangan Aceh pasca-kemerdekaan.

Kata Kunci: Perekonomian, penjajahan Jepang, ekonomi perang

Pendahuluan

Awal tahun 1940-an terjadi perubahan besar yang mengguncang seluruh tatanan kolonial di Nusantara akibat meletusnya Perang Dunia II dan ekspansi militer Jepang ke Asia Tenggara. Tidak lama setelah menaklukkan Semenanjung Tanah Malayu, Jepang berhasil menaklukkan Hindia Belanda. Aceh berhasil diduduki pada awal Maret 1942 dengan relatif tanpa perlawanan militer berarti dari pihak Belanda yang telah lumpuh. Fakta yang cukup menarik adalah proses kedatangan Jepang ke Aceh diundang secara resmi oleh rakyat Aceh. Untuk mempercepat masuknya pasukan Jepang, Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang memiliki pengaruh cukup besar dalam masyarakat Aceh sejak akhir tahun 1930-an, mengirim utusan resmi ke Penang, Malaysia, untuk mengundang Jepang segera masuk ke Aceh. Hal ini dilakukan sebagai upaya terakhir untuk dapat mengusir Belanda keluar dari bumi Aceh.

Tidak lama setelah pendudukan, Panglima Tentara Jepang Wilayah Sumatera yang berkedudukan di Bukittinggi, mengeluarkan kebijakan dengan menempatkan seluruh kehidupan masyarakat di bawah kendali ketat. Dalam Upaya Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya, ekonomi sepenuhnya dijadikan instrumen perang total yang harus dimobilisasi secara maksimal untuk mendukung kebutuhan militer Jepang. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi tidak lagi dijalankan secara normal sebagai aktivitas produksi dan perdagangan untuk kesejahteraan rakyat.

Ciri kebijakan ekonomi pemerintah penjajahan Jepang di Indonesia adalah terjadinya sentralisasi pengambilan

keputusan, pengendalian penuh atas produksi dan distribusi, pembatasan keras perdagangan swasta, penetapan harga dan sistem rasioning, pengenalan mata uang pendudukan, serta pengerahan tenaga kerja secara paksa (*romusha*). Kebijakan-kebijakan tersebut diterapkan dengan sangat di Aceh, dan seringkali kali tanpa mempertimbangkan kondisi lokal, sehingga menimbulkan dampak yang sangat merusak bagi fondasi ekonomi rakyat. Salah satu kebijakan paling menonjol adalah kewajiban wajib serah (*penyerahan paksa*) hasil pertanian, terutama padi, kepada pemerintah militer dengan harga yang ditetapkan sangat rendah atau bahkan tanpa kompensasi yang layak sama sekali. Penetapan jumlah hasil pertanian yang wajib diserahkan oleh petani seringkali melebihi surplus yang dimiliki petani kecil. Hal ini membuat para petani terpaksa mengurangi cadangan pangan keluarga mereka dan bahkan banyak dari mereka yang menyembunyikan hasil panennya agar tidak diambil oleh Jepang.

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada sektor Perkebunan. Jepang lebih memprioritaskan usaha yang memproduksi komoditas strategis yang dapat mendukung industri perang Jepang (seperti karet). Sebaliknya, tanaman ekspor tradisional yang sebelumnya menopang ekonomi lokal seperti kopra di Aceh dibatasi. Dengan sistem distribusi pangan yang dikendalikan secara ketat oleh negara mengalami kegagalan logistik di banyak daerah, telah memperparah kelangkaan beras di pasar. Ditambah lagi dengan inflasi meroket akibat pencetakan uang pendudukan yang berlebihan dan kekurangan barang, telah mengakibatkan berkembangnya pasar gelap (*black market*) secara luas sebagai alternatif Masyarakat

untuk bertahan hidup, meskipun memiliki Risiko yang tinggi.

Melihat fakta-fakta Sejarah tentang penjajahan Jepang di Aceh yang telah disebutkan sebelumnya cukup menarik, namun kajian yang secara khusus dan mendalam mengkaji keadaan perekonomian Aceh masa penjajahan Jepang masih sangat langka. Narasi Sejarah dalam literatur besar tentang masa panjajahan Jepang cenderung berfokus pada Jawa, atau memberikan gambaran Sumatera secara umum yang seringkali mengaburkan keunikan pada tingkat lokal. Padahal Aceh memiliki dinamika yang unik, dimana tingkat organisasi kemasyarakatan berbasis kampung dan agama yang kuat, tradisi kemandirian ekonomi pedesaan, serta sejarah perlawanan terhadap kekuasaan asing yang dapat memengaruhi pola respons terhadap kebijakan pemerintahan penjajahan Jepang. Oleh karena itu, denga memahami secara rinci bagaimana kebijakan ekonomi perang Jepang dijalankan di Aceh dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat sampai tingkat bawah, sangat penting untuk menutupi kelangkaan historiografi tentang sejarah ekonomi Indonesia pada masa krisis. Kajian ini juga dapat memberikan perspektif historis yang relevan untuk memahami akar masalah kemiskinan dan dislokasi ekonomi di Aceh pasca-kemerdekaan yang tidak dapat dilepaskan dari kehancuran struktur ekonomi lokal pada periode penjajahan Jepang, 1942-1945.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam keadaan perekonomian Aceh selama selama tiga tahun penjajahan Jepang. Secara lebih spesifik, tulisan ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan pokok, yaitu: (1) Bagaimana kebijakan pemerintahan penjajahan Jepang dalam bidang ekonomi dirumuskan dan diimplementasikan di wilayah Aceh? (2)

Sektor-sektor ekonomi mana saja yang paling terdampak secara signifikan dari kebijakan tersebut? (3) Bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap kondisi kehidupan ekonomi masyarakat Aceh secara luas, terutama kelompok masyarakat bawah, dan bentuk adaptasi yang mereka lakukan.

Metode

Penulisan Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah kritis. Proses pengumpulan data dilakukan dengan penelitian arsip dan studi perpustakaan (Kuntowijoyo, 2003). Sumber utama penelitian ini adalah data-data tertulis baik yang didapatkan terutama arsip Bank Indonesia dan juga memoir yang cukup banyak ditulis oleh pelaku Sejarah di Aceh. Informasi dari Memoar tersebut cukup penting untuk memahami kondisi zaman masa penjajahan Jepang. Sumber lain yang juga sangat penting digunakan dalam tulisan ini laporan-laporan surat kabar yang terbit masa penjajahan Jepang yang banyak memuat kebijakan-kebijakan pemerintah. Kedua data utama tersebut dipadukan dengan data sekunder, baik berbentuk buku, jurnal, dan karya tulis lainnya.

Oleh karena fenomena yang ingin dieksplorasi adalah fenomena historis, maka sumber-sumber tersebut diproses dalam bingkai metode sejarah. Mulai dari proses pengumpulan sumber sampai ke tahap penulisan akhir dilakukan dengan mengacu pada metode sejarah (Gilbert J. & Garraghan, 1946). Baik sumber dokumen, data surat kabar, maupun sumber sekunder lainnya diverifikasi untuk mencari keotentisitas dan kredibilitasnya, sehingga akan melahirkan sumber yang benar-benar mewakili realitas historis. Sumber-sumber terpilih tersebut kemudian diinterpretasi dalam kaitannya dengan konteks sosial dan politik untuk kemudian dirangkai dan dinarasikan dalam bingkai Artikel Ilmiah ini.

Hasil dan Pembahasan

Proses Masuknya Jepang ke Aceh

Proses masuknya Jepang ke Aceh relatif lebih mudah dibandingkan dengan di daerah lain di Indonesia. Mendaratnya Jepang di Aceh hampir tidak terjadi perlawanan dari pasukan Belanda sama sekali. Hal ini berkaitan erat dengan kebencian rakyat terhadap Belanda semakin tinggi saat itu. Kebencian tersebut terjadi sebagai akibat dari kegagalan pemerintah kolonial Belanda menampung aspirasi rakyat Aceh masa-masa akhir kekuasaan mereka di Aceh. Akibatnya terjadi kembali beberapa perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda di beberapa tempat pada penghujung tahun 1930-an. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi pasukan Jepang yang datang kemudian.

Setelah pasukan Jepang berhasil menduduki Semenanjung Malaya (Malaysia), Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) mengirim utusan ke Penang, Malaysia pada 20 Februari 1942, antara lain: Said Abubakar dan Said Ibrahim untuk bertemu dengan pembesar pasukan Jepang di sana. Tujuannya adalah membawa surat resmi Pengurus Besar PUSA kepada penguasa Jepang yang isinya permohonan agar tentara Jepang segera masuk ke Aceh, sehingga Belanda akan terusir dari Aceh. Dari Penang, mereka diantar ke Singapore untuk bertemu Ketua Barisan F, Mayor Fujiwara, kemudian kembali ke Aceh bersama tentara Jepang (Sjamsuddin, 1999).

Pasukan Jepang melakukan pendaratan pertama ke Aceh di Pantai Balung di ujung tenggara Pulau Weh (Sabang). Sebuah batalion infanteri dari Detasemen Kobayashi mendarat di tempat ini tanpa perlawanan, karena prajurit Belanda yang sebelumnya berada di sana telah ditarik mundur. Selanjutnya dilanjutkan dengan pendaratan ke Aceh daratan di Tanjung Pedro di sebelah timur laut Kutaraja (Banda Aceh sekarang) berkekuatan dua batalion dari detasemen yang sama yang didukung oleh sebuah

batalion artileri lapangan. Sasaran utamanya adalah merebut lapangan terbang Lhoknga dan bergerak ke timur untuk bergabung dengan Detasemen Yoshida yang sudah mendarat di selatan Idi, Aceh Timur, dengan sebuah batalion infanteri untuk merebut ladang minyak Lantja dan Pangkalan Brandan di Sumatera Timur (Sjamsuddin, 1999).

Pendaratan tentara Jepang di Aceh berjalan sangat mulus karena tidak mendapat perlawanan sedikitpun, karena tentara dan orang-orang sipil Belanda lainnya sudah tidak ada lagi di Banda Aceh dua hari sebelum pendaratan Jepang. Orang-orang KNIL dari bangsa Indonesia banyak yang lari dari tangsi dan meminta perlindungan di kampung-kampung. Sejak tanggal 12 Maret 1942 Banda Aceh sudah menjadi kota terbuka. Rakyat bebas mengambil apa saja yang ditinggalkan Belanda, baik di rumah-rumah, di kantor-kantor, dan gudang-gudang perusahaan. Serdadu-serdadu Jepang yang masuk kota pada tengah hari membiarkan saja keadaan tersebut. Kedatangan pasukan Jepang mendapat sambutan yang hangat dari orang Aceh. Mereka menyambut kedatangan pasukan Jepang yang dianggap sebagai "saudara tua" dengan berbagai cara (Hasjmy, 1995).

Sama dengan yang dilakukan di wilayah Indoensia lainnya, setelah situasi relatif stabil Jepang juga membentuk sistem pemerintahan sipil sampai ke tingkat paling kecil di Aceh. Untuk wilayah Sumatera, pemerintahan militer Jepang membentuk 10 *Syu* (Keresidenan), yang terdiri atas *Bunsyu* (*Afdeling*), *Gun* (*Onder Afdeling*) dan *Son* (Distrik). Aceh merupakan satu dari sepuluh *Syu* yang ada di Sumatera yang masing-masing diperintah oleh seorang *Syu cokan*. Di Aceh *Syu* dibagi menjadi 4 *Bunsyu*, yaitu: Aceh Besar dengan ibukotanya Kutaraja, Pantai Barat Aceh dengan ibukotanya Meulaboh, Pantai Utara Aceh dengan ibukotanya Sigli, dan Pantai Timur Aceh dengan ibukotanya Langsa.

Masing-masing *Bunsyu* ini dikepalai oleh seorang *Bunsyucu*. *Bunsyu-bunsyu* tersebut dibagi lagi menjadi 22 *Gun* yang diperintahi oleh seorang *Gunco*. *Gun* ini dibagi lagi atas *Sen* (distrik-distrik atau *Uleebalangschap*) yang masing-masing diperintahi oleh seorang *Sonco*. Seterusnya *Sen* terdiri atas beberapa *Kumi* (gampong) yang masing-masing diperintahi oleh seorang *Komico*.

Dalam bidang administrasi pemerintahan, pemerintah Jepang mengambil kebijakan yang sedikit lebih longgar dibandingkan dengan pemerintah Hindia Belanda. Orang-orang Jepang hanya menduduki jabatan-jabatan penting saja yaitu *Syu Cokan* dan *Busyucu*, sedangkan *Gunco* (*Controleur*) yang masa colonial Belanda dijabat oleh orang-orang Belanda, masa Jepang jabatan ini diberikan kepada orang Aceh, kecuali beberapa daerah yang dianggap terpencil, seperti Sabang, Sinabang, Singkil, dan Kutacane, jabatan tersebut dijabat langsung oleh pejabat-pejabat Jepang (T. Syamsuddin et al., 1987).

Kebijakan Jepang Terhadap Perbankan dan Sirkulasi Uang

Pemerintah penjajahan Jepang di Aceh tidak hanya melakukan reorganisasi dalam bidang pemerintahan, tetapi juga mengubah tata kelola ekonomi dan keuangan. Kebijakan ini dilakukan untuk seluruh wilayah penjajahannya. Secara struktural kebijakan keuangan berada di tangan pemerintah militer pusat (Gunseikanbu). Departemen Keuangan (Zaimubu) berada di bawah garis komando pemerintah militer dan tugasnya adalah sebagai unit administrasi. Di sektor perbankan dan keuangan, pemerintah Jepang telah mempersiapkan badan atau lembaga khusus yang bertugas menangani beberapa tahun sebelum wilayah target penjajahan berhasil dikuasai. Pemerintah Jepang juga telah mempersiapkan para bankir dan sejumlah jenis mata uang yang nantinya akan diedarkan di wilayah-wilayah penjajahan. Mata uang yang dibawa

oleh pemerintah militer Jepang ini dikenal sebagai mata uang militer, di antaranya *gulden* untuk Hindia Belanda, *straits dollar* untuk wilayah Semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara (North Borneo), *rupee* untuk wilayah Burma, *peso* wilayah Filipina, serta *pound* untuk Australia (Australian Trust Territories). Adapun kurs mata uang tersebut senilai dengan 1 yen Jepang, kecuali *pound* yang ditetapkan pemerintah Jepang nilainya setara dengan 10 yen (Yoshimasa, 2013).

Di bidang keuangan, persiapan yang dilakukan Jepang sebelum mendarat di Hindia Belanda adalah mempersiapkan dan menyuplai uang *gulden* sejumlah 81.783 juta *gulden*. Uang yang dipersiapkan tersebut digunakan untuk biaya operasi pendaratan Tentara ke-16 di Jawa, Tentara ke-25 di Singapura dan Sumatra, dan penugasan Angkatan Laut ke-2 di wilayah Indonesia Timur yang berpusat di Makassar (T. Syamsuddin et al., 1987). Dalam catatan pada 6 Desember 1941, setidaknya terdapat sekitar 316 juta *gulden* uang yang diedarkan oleh DJB. Kemudian bertambah lagi dengan adanya peredaran uang di Jawa yang diedarkan Jepang sekitar 26,445 juta *gulden* dan di wilayah Sumatra sekitar 5,567 juta *gulden*. Banyaknya jumlah uang yang beredar ini membuat inflasi di Hindia Belanda terus meningkat (Umar et al., 2021).

Pada awal kedatangan Jepang, Maret 1942, jajaran direksi bank di Hindia Belanda, termasuk Direksi *De Javasche Bank* (DJB), diminta untuk menandatangani penyerahan seluruh kekayaan bank tanpa syarat secara paksa oleh tentara penjajahan Jepang. Akibatnya, seluruh DJB tidak lagi memiliki kekuatan ekonomi di Hindia Belanda, termasuk pula penutupan DJB *Agentschap* Koetaradja. Setelah Merdeka *De Javasche Bank* dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi Bank Indonesia. Sejak 11 Februari 1942 operasional DJB di Kutaraja sudah mulai dihentikan, namun penutupan secara total

tersebut baru terjadi pada Oktober 1942. Keputusan yang dilakukan tersebut diambil dalam situasi yang sangat genting dan mendesak. Langkah Jepang selanjutnya adalah menutup seluruh bank Belanda dan asing lainnya yang beroperasi di Hindia Belanda.

Langkah selanjutnya setelah semua bank asing ditutup, sejak 10 Mei 1942 bank-bank Jepang dibuka dan beroperasi di Jawa seperti dimuat dalam harian *Asia Raya*. Bank-bank tersebut berada di bawah pengawasan pemerintah militer Jepang dan menjalankan aktivitas perbankan, seperti simpan pinjam, penyimpanan deposito, dan lain-lain (Tschoegl, 2001). Jepang kemudian mendirikan *Nanpo Kaihatsu Ginko* (NKG) sebagai bank sirkulasi yang telah dipersiapkan oleh pemerintah Jepang sejak Desember 1941. NKG didirikan untuk mengatur sistem moneter di wilayah yang menjadi penjajahan Jepang. Operasional NKG secara resmi terhitung sejak Maret 1942 (Yoshimasa, 2013). Meski NKG telah didirikan, namun tugas NKG terkait pengawasan perbankan dipercayakan untuk dilakukan oleh Yokohama Specie Bank (YSB) dan Taiwan Bank (TB). Dengan demikian, operasional harian NKB di berbagai kota yang menjadi wilayah penjajahan Jepang, dijalankan oleh kedua bank tersebut. Adapun pembagian untuk kedua bank tersebut, Yokohama Specie Bank ditugaskan mengawasi bank-bank lokal di wilayah Jawa, sedangkan Taiwan Bank mengawasi wilayah luar Jawa (Tschoegl, 2001).

Dalam bidang sirkulasi mata uang, pemerintah penjajahan Jepang berusaha keras untuk mempertahankan nilai gulden dan rupiah Hindia Belanda. Tujuannya adalah untuk dapat mempertahankan harga barang-barang seperti sebelum perang dan untuk mengawasi lalu lintas permodalan dan arus kredit. Untuk itu, uang rupiah Hindia Belanda dinyatakan tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah (Djoened et al., 1993). Guna kemudahan bagi rakyat

Aceh dalam memperoleh kredit pemerintah penjajahan Jepang membentuk *Shomin-ginko* atau bank-bank desa seperti yang pernah dilaksanakan oleh bank-bank rakyat di Aceh masa kolonial Belanda dulu.

Di bidang moneter, pemerintah militer Jepang kemudian mengeluarkan suatu kebijakan baru dengan pelarangan penggunaan mata uang selain uang gulden Jepang. Untuk memudahkan pengawasan dan kontrol terhadap peredaran mata uang, pemerintah berharap mata uang Jepang nilai tidak anjlok, sehingga perekonomian tetap stabil. Pemerintah militer Jepang melakukannya dengan menarik mata uang Belanda yang beredar di masyarakat dan menggantikannya dengan menerbitkan mata uang kertas baru yang oleh penduduk pribumi dikenal dengan uang militer atau uang invasi (Yoshimasa, 2013). Proses penarikan uang Hindia Belanda di Aceh dilakukan secara cepat dan besar-besaran seperti disaksikan oleh Ali Hasan A.S. saat Jepang menduduki Aceh Tengah yang tuangkan dalam tulisannya "Kisah Perjuangan Mempertahankan Daerah Modal Republik Indonesia", diceritakan bahwa:

"Suatu hari pada bulan Maret 1942 penulis disuruh menunggu di Pesanggrahan yang sekarang bernama Hotel Suka Jaya Takengon. Di dalam kamar hotel tersebut penuh dengan goni-goni yang berisi uang kertas Javasche Bank dalam seri berurutan, sedangkan semua tentara Jepang meninggalkan tempat tersebut untuk mengadakan pengejaran terhadap tentara Belanda di sekitar kota dalam rangkaian pembersihan (Ali Hasan, 1990).

Selama masa penjajahan, setidaknya terdapat tiga emisi uang kertas yang diedarkan oleh pemerintah militer Jepang. *Pertama*, emisi *De Japansche Regering* merupakan uang invasi Jepang yang terdiri atas tujuh pecahan, di antaranya 1 sen, 5 sen, 10 sen, ½ gulden, 1 gulden, 5 gulden,

dan 10 gulden. *Kedua*, emisi *Dai Nippon* terbitan NKG dalam mata uang rupiah, di antaranya pecahan 100 rupiah dan 1000 rupiah. *Ketiga*, emisi *Dai Nippon Teikoku Seihu* terbitan NKG dalam mata uang rupiah, terdiri atas ½ rupiah, 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, dan 100 rupiah (Umar et al., 2021).

Sejak 11 Maret 1942, berdasarkan UU No. 1 kepala militer pasukan Jepang mengumumkan melalui surat, gulden dan mata uang militer merupakan alat transaksi yang sah di wilayah penjajahan Jepang di Indonesia. Selanjutnya, pada bulan September 1944 NKG menerbitkan mata uang yang dikenal sebagai uang *Nanpatsu*. Mata uang ini dicetak di Jawa dengan pecahan ½ rupiah, 1 rupiah, 5 rupiah, dan 10 rupiah. Selain Jawa, uang ini juga disebar hingga ke Sumatra, Kalimantan, serta Indonesia bagian Timur. Jepang juga secara sporadis menerbitkan uang logam berbahan aluminium terdiri atas 1 sen, 5 sen, dan 10 sen yang beredar secara terbatas. Hingga pertengahan 1945, mata uang penjajahan yang telah beredar angkanya mencapai 2,4 miliar gulden. Sebanyak 1,4 miliar gulden di Sumatra, sedangkan di Kalimantan dan Sulawesi jumlah peredarannya relatif kecil.

Keberadaan NKG di Sumatra juga ditandai dengan beredarnya uang-uang Jepang yang dikenal sebagai uang *Nanpatsu* dengan pecahan yang sama seperti yang tersebar di wilayah lain. Namun, NKG secara khusus mencetak uang pecahan khusus di Sumatra, antara lain 100 dan 1000 rupiah. Pencetakan dan penerbitan mata uang pecahan khusus di Sumatra ini diduga sebagai upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat akibat lesunya ekonomi di Sumatra akibat perang.

Keadaan Perdagangan dan Perekonomian Rakyat

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan utama Jepang untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya, maka kebijakan ekonomi yang mereka

jalankan di Hindia Belanda juga ekonomi perang. Implikasinya adalah aktivitas perdagangan masa penjajahan Jepang umumnya lumpuh akibat menipisnya persediaan komoditas perdagangan. Barang-barang yang dibutuhkan oleh rakyat didistribusikan melalui distributor-distributor yang ditunjuk oleh Jepang. Kebijakan perdagangan yang tertuang dalam Osamu Seirei No. 38/1943 menetapkan bahwa semua barang harus dijual dengan harga yang ditentukan. Barang-barang yang diklasifikasi penting, baik yang berhubungan langsung dengan kebutuhan perang maupun barang yang menyangkut kehidupan dan kebutuhan rakyat dikuasai oleh pemerintah. Demikian juga penggunaan dan distribusinya diawasi secara ketat oleh pemerintah. Kebijakan ini menjadi penyebab tambahan kelumpuhan perdagangan. Selain itu, kelumpuhan perdagangan juga diakibatkan oleh blokade Amerika Serikat terhadap wilayah-wilayah yang diduduki oleh Jepang (Djoened et al., 1993).

Saat perang berkecamuk dan dilakukan blokade oleh Sekutu, barang-barang impor atau substitusi impor semakin berkurang, terutama tekstil, menyebabkan barang tersebut menjadi langka di pasaran. Sebelum masa penjajahan Jepang, kebutuhan pakaian rakyat Aceh diperoleh dengan mengandalkan pada kain impor yang didatangkan dari India, Cina, dan Eropa. Tidak lama setelah berkuasa, Pemerintah Jepang mengambil kebijakan penghentian seluruh impor kain. Akibatnya hampir seluruh toko pakaian di Aceh tutup dan rakyat mulai kekurangan sandang. Walaupun ada harganya sangat mahal. Kekurangan sandang ini berpengaruh terhadap kehidupan rakyat Aceh, yang terpaksa menggunakan goni, tikar, bahkan kulit kayu sebagai bahan pakaian. Orang mati pun terpaksa harus dikafani dengan goni. Akibat penggunaan kain goni, banyak rakyat yang terkena penyakit kudis buta

(K.H & Sari, 2017).

Ketatnya pengaturan pemerintah penjajahan Jepang terhadap peredaran barang, terutama barang-barang sandang dan pangan menyebabkan banyak pedagang yang sulit bertahan. Para pedagang bumi putra walaupun masih melakukan kegiatan-kegiatan mereka dibidang perdagangan namun tidak dapat mengembangkan usaha mereka. Dalam situasi seperti ini banyak di antara mereka yang meninggalkan usaha dagang, karena kebutuhan rakyat di bidang sandang dan pangan diusahakan oleh pemerintah dan disalurkan kepada rakyat melalui Bagi Dan Kumpul (BDK) yang telah dibentuk di tiap-tiap Son. Macetnya aktivitas perdagangan pada masa penjajahan Jepang mengakibatkan rakyat sangat sulit memperoleh bahan-bahan keperluan sehari-hari seperti kain, minyak tanah dan lain-lain. Bahan-bahan yang didatangkan oleh Jepang dari luar umumnya dipergunakan untuk kebutuhan militer, bukan untuk kepentingan rakyat banyak (T. Syamsuddin et al., 1987).

Selain dalam bidang perdagangan, kemerosotan juga terasa dalam bidang perekonomian rakyat. Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, sejak menjelang pertengahan tahun 1930-an perekonomian rakyat di Aceh mulai membaik. Usaha serius pemerintah colonial Belanda memperbaiki perekonomian rakyat dalam upaya menghindari kelaparan akibat depresi ekonomi mulai membuahkan hasil. Aceh yang sebelumnya selalu mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhannya mulai dapat berswasembada. Malahan Aceh untuk masa-masa selanjutnya mengalami surplus beras sehingga dapat diekspor ke Sumatera Timur. Demikian juga hasil pertanian rakyat lainnya seperti lada, pinang, kopra, dan karet rakyat yang mulai berproduksi kembali setelah mengalami kehancuran akibat perang yang lama, karena dukungan dari pemerintah kolonial. Keadaan ini

berubah setelah Aceh berada di bawah penjajahan Jepang. Keadaan ekonomi Aceh mengalami penurunan drastis akibat Jepang lebih focus pada proyek perangnya (Umar et al., 2021).

Setelah proses pendaratannya di Aceh selesai, Jepang mengambil-alih semua kegiatan dan pengendalian ekonomi. Langkah pertama yang dilakukan Jepang adalah merehabilitasi prasarana ekonomi seperti jembatan, alat-alat transportasi, telekomunikasi dan lain-lain yang bersifat fisik. Beberapa peraturan yang bersifat kontrol terhadap kegiatan ekonomi dikeluarkan. Untuk mencegah meningkatnya harga barang dan timbulnya pelbagai manipulasi secara setempat dikeluarkan peraturan pengendalian harga dan hukuman berat bagi pelanggarnya.

Harta milik bekas musuh atau harta yang dibiayai dengan modal musuh (Barat), seperti perkebunan, bank, pabrik, dan perusahaan vital seperti pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transportasi, disita dan dijadikan milik pemerintah Jepang. Khusus untuk perkebunan, dikeluarkan Undang-Undang No. 22/1942 yang menyatakan bahwa Gunseikan (kepala pemerintahan militer) langsung mengawasi perkebunan-perkebunan kopi, kina, karet, dan teh, yang pelaksanaannya diserahkan kepada sebuah bada pengawas bernama *Saibai Kigyo Kanrikodan* (SKK). SKK selain bertindak sebagai pengawas juga bertindak sebagai pelaksana pembelian dan penentuan harga penjualan hasil perkebunan tersebut, sekaligus sebagai pemberi kredit kepada perkebunan yang diunjuk oleh Gunseikan untuk direhabilitasi. Sebagai pelaksana penguasaan perkebunan-perkebunan tersebut, ditunjuk beberapa perusahaan swasta Jepang. Di Aceh, perkebunan-perkebunan yang sebelumnya milik swasta Barat, terutama di Aceh Timur diserahkan pengelolaannya oleh pemerintah penjajahan Jepang kepada perusahaan Jepang Nanyo Goma dan Nomura (Amin,

1978).

Demikian juga halnya dalam bidang perekonomian rakyat yang juga berada di bawah control sepenuhnya pemerintah penjajahan Jepang. Pada mula kedatangannya Jepang memang bermaksud untuk meningkatkan kehidupan perekonomian rakyat Aceh dengan membentuk *Atjeh Shu Seito Sangu Kotabutyo* (Kepala Urusan Ekonomi dan Lalu Lintas di bawah pimpinan S. Masubuti (Sjamsuddin, 1999). Konsepsi ekonomi pemerintah penjajahan Jepang dalam upaya membangun ekonomi Aceh, sebagaimana disampaikan oleh S. Masubuti, sebenarnya cukup bagus dan sangat logis dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Konsepsi ekonomi tersebut mencakup pembangunan beberapa bidang sentral, seperti bidang pertanian, pengairan, kerajinan, peternakan, dan pertambangan. Menurut Masubuti, telah dibuat rancangan oleh Jepang dalam memenuhi cita-cita untuk memajukan pengairan dalam upaya menghapus sawah “berhandar langit” di Aceh. Diupayakan juga memperluas lahan untuk ditanami dengan bibit unggul agar hasilnya memuaskan. Selain itu juga diupayakan untuk memperbaiki sistem membajak tanah sawah dengan sistem yang modern. Dalam bidang kerajinan, kepada rakyat Aceh dianjurkan untuk memajukan usaha memelihara ulat sutera dan usaha menanam kapas, agar rakyat Aceh dapat membuat sendiri pakaian secukupnya. Untuk peternakan sedang diupayakan untuk diadakan satu latihan besar dari berbagai golongan pertanian (*hozi kurenzyo*) bagi para pemuda Aceh. Mereka yang telah tamat menempuh pelatihan ini akan dikirim ke tempat-tempat lain di seluruh Aceh untuk menjalankan kewajibannya untuk kepentingan memajukan pertanian dan kemakmuran negeri (T. Syamsuddin et al., 1987).

Dalam perkembangan selanjutnya konsepsi tersebut tidak pernah dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah penjajahan

Jepang, sehingga kehidupan ekonomi rakyat masa Jepang sangat merosot. Program perluasan jaringan pengairan dan areal persawahan yang merupakan tulang punggung perekonomian Aceh tidak banyak dilakukan pembenahan. Pemerintah Jepang hanya mengandalkan pengerahan tenaga rakyat untuk melakukan perbaikan irigasi-irigasi yang telah ada (Alfian et al., 1982). Dalam upaya meningkatkan produksi pertanian rakyat, pemerintah penjajahan Jepang telah menginstruksikan untuk membersihkan tali air di sawah-sawah dengan sistem gotong-royong. Berbeda dengan masa sebelumnya, sistem gotong-royong pada zaman Jepang tidak dilakukan secara sukarela tetapi dengan cara paksaan, dimana semua rakyat yang mendiami daerah-daerah yang kena pekerjaan gotong-royong harus ikut semua yang dipimpin langsung oleh orang-orang Jepang sendiri (Alfian et al., 1982).

Melalui koneksinya dengan para *uleebalang* (bangsawan), Jepang memaksa rakyat untuk menyerahkan padinya kepada BDK. Jepang juga memaksa masyarakat untuk bekerja keras secara paksa guna membangun jalan, lapangan terbang, benteng-benteng pertahanan, dan lain-lain. Selain *uleebalang*, Jepang juga menggunakan para ulama sebagai alat propagandanya. Menyadari bahwa pentingnya peran ulama bagi masyarakat Aceh, Jepang meminta para ulama untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa penyerahan padi, pembuatan lapangan terbang, jalan raya, benteng-benteng pertahanan, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya adalah upaya untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya (Hasjmy, 1995). Kemenangan tersebut – sampaikan oleh Jepang – nantinya akan menjadikan Asia makmur dan rakyat Asia merdeka serta bahagia.

Faktor lain yang ikut mempengaruhi turunnya kesejahteraan hidup petani di Aceh masa penjajahan Jepang adalah dibentuknya sebuah badan untuk membeli

dan mengutip padi dari sisa produksi petani buat keperluan suplai militer. Pada tanggal 1 April 1944 pemerintah penjajahan Jepang membentuk badan bernama *Shukaikai* atau Bagi Dan Kumpul (BDK) yang bertujuan mengumpulkan bahan-bahan pangan milik rakyat dan kemudian membagi-bagikannya. Dalam kaitan dengan pembentukan badan ini, *Sumatora-homensaike-shikikan* (Panglima Militer Sumatera) di Bukittinggi mengeluarkan Peraturan Nomor 49 Tanggal 25 Februari 1944 yang menetapkan bahwa, bagi siapa saja yang tidak mau menyerahkan kelebihan produksi padi kepada pemerintah diancam dengan hukuman seumur hidup atau hukuman sementara setinggi-tingginya selama 20 tahun atau denda f.200.000,-. Berarti dengan didirikannya BDK tertutuplah kesempatan bagi rakyat untuk menjual bahan-bahan pangan mereka secara sukarela kepada pemerintah Jepang yang pelaksanaannya di Aceh diserahkan kepada salah satu konsern Jepang terbesar bernama *Mitsubishi Shosen Kabu-shikikaisha* (MSK).

Mengingat fungsinya yang sangat urgen bagi keperluan militer Jepang, pembentukan BDK dilakukan dengan sangat serius sampai di tiap-tiap *son*. Tugas dari BDK bukan hanya sebagai badan penyalur, tetapi juga bertindak sebagai penampung. Dalam usaha melakukan penampungan hasil bumi dari rakyat terutama padi yang menjadi sumber makanan pokok, dikumpulkan dari petani oleh orang-orang yang ditunjuk mengelola BDK. Pengumpulan dilakukan secara paksaan, walaupun dibayar harganya kepada petani, namun harganya ditentukan oleh Jepang. Apabila ada rakyat yang tidak mau menyerahkan padi mereka kepada BDK akan dikenakan hukuman fisik. Oleh karena itu, dengan sinis kepanjangan BDK diplesetkan oleh rakyat Aceh dari Bagi Dan Kumpul menjadi "*Bah Di Kee*" (biar untuk aku) dan "*Bek Di Kah*" (tidak untuk kamu) (Alfian et al., 1982).

Jumlah bahan pangan yang harus dikumpulkan oleh BDK, terutama padi dari rakyat, dibuat target oleh pemerintah penjajahan Jepang untuk setiap tahun panen, yang kemudian dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh. Sebagai contoh, dalam sidang ketiga Majelis Perwakilan Rakyat Daerah Aceh tanggal 19-20 Oktober 1944, masalah utama yang dibicarakan adalah penyerahan panen pangan rakyat. Masalah itu dibicarakan karena sangat kurangnya penyerahan hasil pertanian akibat banyaknya penduduk yang dikerahkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sukarela bagi tentara. Selama bulan April-September 1944 tahun panen 1944/1945 seharusnya diserahkan oleh petani 16.250 ton padi, tetapi yang diterima pemerintah hanya 6.969 ton. Lebih parah lagi jumlah palawija yang tadinya diharapkan akan diserahkan sebanyak 1.500 ton, tetapi dalam kenyataannya hanya 425 ton. Dalam sidang ketiga Majelis Perwakilan Rakyat Daerah Aceh tanggal 20-21 April 1945 ditetapkan bahwa untuk tahun panen 1945/1946, jumlah bahan pangan berupa beras yang harus diserahkan oleh petani kepada pemerintah naik 50 persen dari jumlah tahun panen yang lalu, yaitu dari 22.000 ton menjadi 33.000 ton. Penambahan jumlah penyerahan tersebut berkaitan dengan bertambahnya keperluan bagi Heiho dan Giyugun (tenaga romusya) yang dipekerjakan pada bangunan-bangunan umum (Alfian et al., 1982).

Selain pengumpulan bahan pangan, pemerintah penjajahan Jepang juga mengharuskan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh untuk dapat mengumpulkan uang untuk pembelian pesawat terbang untuk kepentingan militer Jepang. Usaha pengumpulan dana untuk pembelian kapal udara Aceh tersebut terealisasi pada sidang ketiga Majelis Perwakilan Rakyat Daerah Aceh dengan terkumpulnya uang yang pertama sebanyak f.100.000,- yang diserahkan oleh ketua majelis kepada

residen atas nama rakyat. Pada tanggal 7 November berikutnya menghasilkan f.100.000,- dan tanggal 22 Desember mencapai f.1.000.000,-. Dari jumlah tersebut, f.700.000 diserahkan residen untuk Angkatan Darat Jepang dan f.300.000 untuk Angkatan Laut (Alfian et al., 1982).

Selain itu, para petani juga disibuki oleh tugas *romusha* (kerja rodi) untuk bekerja pada fasilitas-fasilitas umum maupun pada proyek pembuatan kubu-kubu pertahanan dan lapangan terbang untuk pertahanan Jepang. Intensifnya penggunaan tenaga *romusha* yang berasal dari para petani desa sebagaimana kesaksian Abdullah Yacob di Matang Glumpang Dua (Kabupaten Bireun sekarang) yaitu "Di kampung ... setiap hari saya hanya memperhatikan orang-orang kampung yang dipaksa bergotong-royong untuk membuat pertahanan atau lapangan terbang darurat di Teupin Mane oleh Jepang". Penyodotan tenaga petani oleh Jepang membawa implikasi luas terhadap kehidupan pertanian di Aceh, terutama pertanian padi sawah, sehingga pengelolaan sawah kurang teratur. Dengan banyaknya kaum pria diangkut untuk dijadikan tenaga paksa (*romusha*) sehingga lahan persawahannya hanya dikerjakan oleh kaum wanita saja. Akibatnya hasil yang didapat tidak maksimal dan tidak dapat memenuhi kehidupan hidup (K.H & Sari, 2017).

Di antara proyek-proyek besar yang dibangun Jepang yang memerlukan tenaga besar-besaran adalah proyek jalan raya antara Takengon ke Blangkejeren dan proyek pertahanan Gunung Setan di Tanah Alas. Proyek jalan raya Takengon ke Blangkejeren dimulai pada 1 Januari dan selesai pada bulan Juli 1944. *Romusya* yang dikerahkan untuk mengerjakan proyek ini berasal dari Aceh Syu sendiri yang dilakukan oleh sebuah badan bernama Perkumpulan Pekerja-pekerja untuk Umum di Aceh Syu untuk Membina Asia Raya. Sementara itu, proyek basis pertahanan

Gunung Setan yang dikerjakan setelah jalan raya Takengon ke Blangkejeren hampir selesai, mengerahkan para *romusya* dari keresidenan Aceh, keresidenan Sumatera Timur, dan ditambah dengan *romusya* yang didatangkan dari Jawa. Oleh karena proyek pertahanan militer ini memakan waktu yang lama, maka hingga akhir kekuasaan Jepang di Indonesia belum selesai dikerjakan (Alfian et al., 1982).

Berbagai faktor yang saling berkaitan tersebut menyebabkan kesejahteraan hidup masyarakat menurun drastis. Untuk menghindari kelaparan, banyak rakyat Aceh yang memutuskan pindah ke pegunungan atau ke hutan untuk membuka ladang. Di tempat baru itu mereka berusaha menanam ubi, jagung, ketela, dan tanaman pangan lainnya. Bagi yang tidak mampu membuka ladang terpaksa masuk ke hutan untuk mencari makanan seperti batang rumbia untuk diambil sagunya dan pohon nira untuk diambil buahnya (K.H & Sari, 2017).

Untuk mengatasi kesulitan ekonomi tersebut, banyak pemuda Aceh yang memilih memasuki satuan-satuan militer bentukan Jepang, seperti Heiho dan Gyu gun. Diperkirakan ada 5.000 anggota Gyu gun yang terdaftar di Aceh. Biro Sejarah Proma, Medan Area Mengisi Proklamasi,(Medan: Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia Medan Area, 1976). Salah satu motivasi mereka adalah untuk memperoleh jaminan hidup, karena kehidupan ekonomi petani yang kurang baik dan juga untuk menghindari berbagai macam *romusha* bagi kepentingan pemerintah militer (Alfian et al., 1982). Keadaan perekonomian rakyat yang morat-marit ini berpengaruh juga terhadap kehidupan social budaya masyarakat Aceh. Pagelaran kesenian rakyat yang biasa dilakukan baik dalam upacara keagamaan maupun upacara daur hidup seperti *dalail khairat, dike mulod, seudati, ratoh, laweut*, dan lain-lain sudah sangat kurang dilaksanakan (Alfian et al., 1982).

Kesimpulan

Periode penjajahan Jepang di Aceh (1945-1949) merupakan periode yang sulit dan menentukan dalam sejarah perekonomian Aceh. Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan penjajahan Jepang di Aceh bukan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi secara sistematis menjadikan ekonomi sebagai instrumen untuk mendukung upaya memenangkan Perang Asia Timur Raya. Akibatnya, perekonomian Aceh mengalami kemerosotan yang mendalam dalam waktu yang relatif singkat.

Sektor pertanian rakyat yang selama ini menjadi penopang utama kehidupan masyarakat Aceh, mengalami tekanan paling berat. Kebijakan wajib serah hasil panen dengan pengawasan ketat oleh tentara dan aparat lokal yang dikendalikan militer dan pembatasan distribusi dan peredaran beras, mengakibatkan para petani kehilangan kendali atas hasil panen mereka. Krisis beras yang mengakibatkan kemiskinan petani meluas ke berbagai wilayah dipicu oleh kelangkaan pangan. Pemerintah penjajahan Jepang juga mengeksploitasi komoditas perkebunan dan hasil bumi strategis Aceh, seperti karet, kopra, lada, dan hasil hutan. Sistem produksi berada di bawah kontrol ketat militer sesuai dengan kebutuhan perang, sehingga menghancurkan jaringan perdagangan lokal yang telah berkembang sebelumnya.

Ketidakstabilan ekonomi diperparah oleh gangguan moneter dan sistem distribusi. Langkanya barang kebutuhan pokok, banyaknya beredar uang pendudukan Jepang, dan berkurangnya kepercayaan terhadap alat tukar resmi tersebut mengakibatkan terjadinya inflasi terselubung dan berkembangnya pasar gelap. Lembaga-lembaga sosial ekonomi lokal berbasis gotong royong dan kearifan lokal yang semula berfungsi sebagai jaring

pengaman sosial terdesak oleh kontrol militer yang represif, sehingga melemahkan daya tahan masyarakat menghadapi krisis.

Warisan ekonomi yang sulit ini telah meninggalkan dampak trauma kolektif jangka panjang terhadap kebijakan ekonomi yang dijalankan secara paksa dan sewenang-wenang. Oleh karena itu, memahami keadaan ekonomi Aceh pada masa penjajahan Jepang penting sebagai pengingat sejarah bahwa kedaulatan ekonomi dan penghormatan terhadap hak-hak rakyat merupakan prasyarat mutlak bagi kesejahteraan. Pengalaman ini sangat penting untuk dijadikan pelajaran berharga bagi pembangunan Aceh di masa depan, agar kebijakan ekonomi senantiasa berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, dan martabat masyarakat, bukan pada eksploitasi demi kepentingan kekuasaan.

Referensi

- Alfian, T. Ibrahim dkk. 1982. *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (1945-1949)*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh.
- Alfian, T. Ibrahim dkk. *Sejarah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978).
- Ali, Abdullah dkk. 1985. *Sejarah Perjuangan rakyat Aceh dalam Perang Kemerdekaan 1945-1949*. Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Amin, S.M. 1978. *Kenang-Kenangan dari Masa Lampau*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Biro Sejarah Proma, *Medan Area Mengisi Proklamasi*, Medan: Badan

- Musyawarah Pejuang Republik Indonesia Medan Area, 1976), hlm. 50-51.
- Harian Asia Raya tanggal 10 dan 20 Mei 2602 (1942 M.)
- Hasan Ali AS. 1990. "Kisah Perjuangan Mempertahankan Daerah Modal Republik Indonesia" dalam Anonimous, Kisah Perjuangan Mempertahankan Daerah Modal Republik Indonesia Dari Serangan Belanda, Jakarta: Beuna.
- Hasjmy, Ali. 1995. *50 Tahun Aceh Membangun*. Banda Aceh: Majelis Ulama Provinsi Aceh
- Poesponegoro, M.D & Notosusanto, N. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Edisi ke-IV). Jakarta: Balai Pustaka
- Rahardjo, M. Dawam. 1955. *Bank Indonesia dalam Kancah Kilasan Sejarah Bangsa*, Jakarta: LP3ES.
- Ramadhan, K.H & Sari, Fitria. 2017. *Teuku Nyak Arief Renceng Aceh di Volksraad*. Banda Aceh: Yayasan Pendidikan Islam Teuku Nyak Arief.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. 1999. *Revolusi di Serambi Mekkah: Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh, 1945-1949*, Jakarta: UI Press,
- Tim Penulis Bank Indonesia, *De Javasche Bank: Masa Penjajahan Jepang hingga Lahirnya Bank Indonesia*, (Jakarta: Museum Bank Indonesia, 2007), hlm.34
- Tschoegl, Adrian E. 2001 "The International Expansion of Singapore's Large Banks". *Working Paper the Wharton Financial Institutions Center*, Pennsylvania: University of Pennsylvania.
- Umar, Mawardi dkk. 2021, *Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Modal, Bank Indonesia dalam Dinamika Perekonomian Aceh*, Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Yacob, Abdullah. 1990. "Kisah Pengalaman dan Perjuangan Kemerdekaan 1945-1949" dalam Kisah Perjuangan Mempertahankan Daerah Modal Republik Indonesia dari Serangan Belanda Oleh Para Pelaku, Jakarta: Beuna.
- Yoshimasa, Shibata. 1996. "The Monetary Policy in the Netherlands East Indies under the Japanese Administration" *Jurnal Bijdragen tot de Taal-, Land en Volkenkunde*, No. (4), hlm. 699-7